

Pendidikan Islam di Era Merdeka Belajar

Mokh Ulil Hidayat^{1*}

Dosen Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

E-mail: muhdayat@uindatokarama.ac.id

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATA KUNCI

Pendidikan Islam, Merdeka Belajar, Hiper-realiti.

Problem mendasar pengembangan sumber daya manusia terletak dari ketidakmampuannya menghadapi persaingan. Lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan sering kali tidak relevan dengan dunia kerja. Merdeka Belajar sudah menjadi kebijakan yang tidak mungkin dihindari. Kebijakan yang digagas ini bertujuan untuk memperbaiki proses pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan menghadapi tantangan. Pendidikan Islam memiliki keunikan, karena pendidikan Islam tidak hanya sekedar transfer pengetahuan tetapi juga adanya tuntutan pengamalan sehingga lulusan Pendidikan Islam juga memiliki ketundukan dan kepatuhan. Di tengah merdeka belajar, bila diteropong secara hiper-realiti, Pendidikan Islam di era merdeka belajar ini belum secara kuat membuat distingsi benar-benar orisinil dari pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam masih sangat dipengaruhi oleh otoritas kelembagaan induknya, sehingga lembaga pendidikan berjalan tidak sepenuhnya menjalankan konsep merdeka belajar.

1. Pendahuluan

Pendidikan adalah proses untuk mencapai tujuan hidup secara efektif dan efisien. (Ali, , 2008) Dengan demikian, pendidikan didesain secara komprehensif mencakup pendidikannya, pesertanya, materi, metode, media, proses, sarana sarana dan prasarananya. Namun, pendidikan bukanlah suatu proses di ruang hampa. Karena itu, pendidikan harus mempertimbangkan ruang dan waktu agar pendidikan merealita dan kontekstual sehingga mampu menjawab tantangan jamannya.

Karena ilmu dan teknologi, saat ini dunia sudah berubah sedemikian cepat. Perubahan itu tidak bersifat datar dan landai, tetapi perubahan itu terjadi secara spontan dan dalam gradasi yang tajam; lompatan-lompatan capaiannya telah membuat keheranan banyak pihak. Issuennya sudah menjadi fakta dan realita, materinya sudah menjadi fenomena dan bahan diskusi tak berkesudahan oleh kemudahan transportasi dan kecepatan informasi, globalisasi sudah mengintegrasikan dalam kehidupan diri setiap manusia. Globalisasi juga merubah gaya hidup manusia modern dan mesin penggerakannya adalah industry. Industrialisasi dan komersialisasi hampir merambah di seluruh sisi kehidupan manusia. Hampir-hampir tidak ada lagi ruang privasi. Sektor ibadah yang bersifat sakral pun telah menjadi ladang bisnis, bahkan perusahaan sektor layanan ibadah ini pun berani “menggelontorkan” budget yang fantastis untuk membiayai iklan. Tujuannya simple, membangun persepsi sehingga dapat memaksimalkan kepesertaan (konsumen), dengan itu identic dengan profit. Kehidupan saat ini jauh ditentukan persepsi. Persepsi dibangun dengan citra, dan citra dibentuk oleh seberapa kuat informasi yang membentuknya “memaksa” para pihak menerimanya.

Di dunia pendidikan Islam, semarak dan hingar bingarnya merdeka belajar disambut antusias. Namun, perlu dicatat, bahwa pendidikan Islam mestinya tidak terjebak oleh komersialisasi dan industrialisasi. Gegap gempitanya kebangkitan pendidikan Islam sebagai tanda tidak hanya simbolis semata, tetapi mengarah kepada yang lebih substantif. Namun, apakah penetrasi

¹ Dosen UIN Datokarama. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

yang sarwa materialistik ini dapat dicegah? Jika tidak, maka semaraknya pendidikan tinggi Islam ini juga tidak jauh bedanya dengan booming-nya sekolah-sekolah dengan berbagai label, yang marak beberapa masa yang lalu. Dulu, pernah didengar standarisasi dan labelisasi pendidikan dengan istilah Sekolah Bertaraf Nasional (SBN), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Full Day School, Boarding School dan seterusnya. Sekolah-sekolah kemudian berusaha untuk memenuhi standard-standard itu untuk mendapatkan sebuah label. Bahkan, franchise industry di dunia pendidikan juga marak; misalnya yang terjadi pada lembaga-lembaga kursus, bimbingan belajar, home schooling, dan lain sebagainya.

Cyberspacer (ruang maya) juga semakin mendorong dunia pendidikan yang harusnya merealita justru melesakkannya ke alam imajinasi, dan kenyataan sesungguhnya adalah bukan kenyataan itu sendiri. Cyber telah menjelma menjadi budaya sendiri (Azwar, 2014). Tentu hal ini menjadi tantangan yang sangat pelik bagi dunia pendidikan. Aplikasi “Ruang Guru” layaknya “go jek”-nya dunia pendidikan. Di satu sisi memudahkan tetapi ini juga mengandung kekhawatiran yang dapat menimbulkan suatu kekacauan. Eksistensi guru dan lembaga sekolah bisa tergerus oleh fungsi-fungsi perangkat dan gawai yang lebih acceptable, fleksibel dan merdeka. Big data yang dimiliki mesin-mesin pencari (search engine) semisal Google, Amazon, Yahoo dan seterusnya jauh lebih komplis dalam menawarkan alternative informasi.

Membaca perkembangan pendidikan di tengah pekak dan derasnya simbolitas, seperti sekarang ini, agaknya cukup menarik perhatian penulis. Setidak-tidaknya, tokoh seperti Jean Baudrillard dengan teori Simulakra (Simulakrum), Simulasi, dan Hiper-Realitas-nya akan membantu memahami bagaimana membaca pendidikan (Islam) saat ini dan bagaimana seharusnya pendidikan ditempatkan seiring perkembangan jaman yang tuntutannya.

Jean Baudrillard, sosiolog Perancis yang terkenal kritikus budaya dan sosiologi. Baudrillard sering dikaitkan dengan pemikiran postmodernis dan poststrukturalis. (Azwar, 2014) Dilahirkan pada 20 Juni 1929 di sebelah utara kota Reims. Seorang anak pegawai sipil dan cucu lelaki dari seorang petani. Baudrillard belajar bahasa Jerman di Universitas Sorbonne di Paris. Baudrillard adalah figur intelektual terkemuka pada saat itu. Ia menjadi asisten pada bulan September 1966 di Universitas Nanterre Paris. Ia bekerjasama dengan Roland Barthes, dalam analisa semiotik dalam kebudayaan, dalam pertamanya *Obyek Sistem* di 1968. Ia adalah juga dipengaruhi oleh Marshall McLuhan yang memperlihatkan pentingnya media massa dalam pandangan kaum sosiologis. Karena dipengaruhi oleh semangat pemberontakan mahasiswa di Universitas Nanterre. Ia bekerja sama dengan suatu jurnal yaitu *Utopie*, yang dipengaruhi oleh anarcho-situationism, teori media dan Marxisme struktural, di mana ia menerbitkan sejumlah artikel teoritis pada suasana kemakmuran kapitalis, dan kritik teknologi.

Pemikiran Baudrillard dipengaruhi oleh pemikiran filsuf lain yang memiliki pemikiran tentang objectivity and linguistic-sociological interface (Mauss), Surrealism and Eroticism (Bataille), Psychoanalysis dan Freud, dan terutama Marxisme. Lalu ia menjadi seorang yang dikagumi sebagai seorang yang mengerti akan keadaan yang datang pada kondisi posmodernisme. Pemikiran Baudrillard terpancar dalam beberapa pandangan, yaitu hiper-realitas, simulakra, simulasi, Representasi, Tanda, penanda dan petanda, kode dan citra, referendum dan proposisi.

Tulisan ini akan mendeskripsikan tentang kebijakan merdeka belajar sebagai suatu fenomena yang dipandang sebagai suatu realitas baru utamanya pasca pandemi dan perkembangan trend kehidupan yang lebih mengarah pada ramah internet. Situasi ini dipandang sebagai realitas yang melebihi realitas yang sebenarnya, hiper realitas. Hiper-realitas, adalah dunia realitas yang bersifat artifisial atau superfisial yang tercipta lewat bantuan teknologi simulasi dan pencitraan, yang mengambil alih dunia realitas yang alamiah. Hiper-realitas merupakan model-model realitas, yang tidak ada referensinya pada realitas. Hiper-realitas tidak memiliki rujukan atau referensi pada realitas —sebagaimana umumnya dunia representasi atau pertandaan— melainkan merujuk pada dirinya sendiri (self-reference).

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Merdeka Belajar Sebagai Istilah dalam Kebijakan

Gagasan tentang merdeka belajar dipopulerkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makaram. Istilah ini diarahkan kepada bagaimana pendidikan dijalankan secara terbuka dan kemandirian. Menurut Suyanto, Gagasan ini bertujuan untuk membuat lompatan besar bagi dunia pendidikan. Para siswa diharapkan lulus dengan kualitas unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan (Daga, 2021) Kebijakan yang merupakan arahan Presiden itu kemudian diimplementasikan dalam istilah Merdeka Belajar.

Penerapan Merdeka Belajar diwujudkan ke dalam empat bentuk kebijakan, *pertama*, terkait dengan pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional. Dalam pelaksanaan kebijakan ini ujian hanya diselenggarakan oleh sekolah. Namun, bukan berarti ujian ini secara bebas dilakukan oleh sekolah. Di dalam implementasinya, ujian sekolah harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan secara nasional. Kedua, Ujian Nasional tidak lagi menjadi kunci kelulusan siswa. Ujian nasional hanya dijadikan *assessment* secara nasional dengan maksud untuk memperbaiki mutu pendidikan. Karena itu, *assessment* akan dikenakan kepada siswa kelas 4 atau 5 di tingkat sekolah dasar; sementara di kelas 8 untuk siswa SMP dan kelas 11 untuk tingkat SMA. Ketiga terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Kebijakan ini terkait dengan penyederhanaan pelaksanaan pembelajaran. Guru diberi kebebasan untuk membuat, menggunakan dan mengembangkan RPP secara merdeka. Ketiga hal tersebut dipandang akan memberikan keefesienan dalam pembuatan RPP sehingga guru memiliki waktu lebih banyak lagi untuk mengembangkannya. Keempat terkait dengan penerimaan sekolah. Dalam hal ini, diwujudkan dalam tiga kategori, zonasi (50%), afirmatif (15%), pindahan (5%) dan prestasi (0-30%)(kemdikbud.go.id).

Dari keempat kebijakan tersebut dipercaya sebagai “obat mujarab” atas masalah-masalah pendidikan. sehingga dapat mengatasi problem pendidikan yang selama ini, pendidikan Islam belum secara signifikan mampu mengangkat produktifitas masyarakat Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain di kawasan. Problem pendidikan Indonesia masih sangat masif dan bertumpuk. Masalah aksesibilitas, pemerataan, fasilitas dan juga kualitas pendidikan itu sendiri telah secara pasti belum dapat diatasi secara maksimal. Masalah pokok pendidikan sering kali terkait dengan pemrosesan, sehingga berkonsekuensi dengan kualitas luaran (Adawiyah, et.all, 2017). Dengan demikian, pendidikan Indonesia belum mampu mengangkat daya saing di tengah percaturan dunia yang kian ketat. Karena itulah usaha-usaha koreksi dijalankan sekaligus diperbaiki agar ke depan akan semakin baik dan semakin maju. Perbaikan itu harus bersifat mendasar dan berkelanjutan. Tidak boleh perbaikan itu dijalankan “setengah-setengah”.

2.2 Pendidikan Islam dalam Struktur Merdeka Belajar

Pendidikan Islam –dalam pengertian luas, mencakup formal, informal dan non formal– saat ini dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe. Diantaranya adalah: pendidikan tradisional, pendidikan modern, dan pendidikan kombinasi. Model pendidikan Islam mengalami proses replikasi, imitasi, dan sarat dengan simbolisme. Pendidikan Islam bisa dikatakan mengalami perubahan dan tidak lagi *pure otentic*. Lembaga-lembaga pendidikan tradisional sendiri –semacam pesantren salafiah (NU dan sejenisnya)– yang sementara ini dianggap otentik dan khas keindonesiaan; juga sedang mengalami proses adaptasi terhadap perubahan realitas.

Idealisasi pendidikan pesantren mulai terjadi saat mengalami formalisasi melalui undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sebelum ada undang-undang ini, pesantren memiliki kemerdekaan untuk menyelenggarakan pendidikan dengan kekhasannya. Setelah ada undang-undang maka pesantren menjadi seragam. Kalau demikian, undang-undang justru menjadi jerat bagi pesantren. Pesantren menjadi tidak alamiah. Pesantren mengalami reduksi kealamiahannya menjadi ke formalisasi. Dengan undang-undang tersebut, pesantren justru malah “dipaksa” memenuhi berbagai persyaratan agar dapat disebut dengan “pesantren”.

Secara definitif kontekstual, pendidikan agama adalah pendidikan yang bersifat holistik, mencakup penguasaan materi dan sekaligus pengamalannya. Oleh karena itu, pendidikan agama tidak hanya menyangkut penguasaan teoritis semata-mata. Tidak cukup peserta didik menguasai teori-teori tertentu tentang agama. Mereka harus memilih sesuai dengan prinsip yang diyakininya untuk diamalkannya. Tujuan pendidikan Islam adalah menjadikan insan kamil. Selain memiliki kecakapan keilmuan alumnyanya juga memiliki kepatuhan kepada kedua orang tua, hukum agama dan Tuhan. Memahami esensi pendidikan Islam itu maka sebagai kebijakan pemerintah Pendidikan Islam harus benar-benar mampu melahirkan alumni yang cakap secara ilmiah dan cakap secara amaliyah. Pendidikan Islam sebagai satu entitas pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Di tengah kebijakan Merdeka Belajar tersebut, mau tidak mau juga harus mengikuti trend Merdeka Belajar tersebut. Namun perlu dijadikan satu pertimbangan bahwa pendidikan Islam bukanlah semata-mata mentransfer ilmu pengetahuan semata, tetapi juga memberikan pengalaman dalam pengamalan (Darise, 2021).

2.3 Merdeka Belajar Dalam Istilah Kelembagaan

Era baru saat ini, idiom-idiom baru terkait dengan kelembagaan sering kali mengaburkan tujuan dari lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Tumbuh kembangnya kelembagaan pendidikan Islam cukup masif dirasakan. Kelembagaan sosial seperti organisasi kemasyarakatan (Ormas) tampak berlomba-lomba secara artikulatif mendirikan lembaga pendidikan. Pada satu sisi hal ini menjadikan semakin menunjukkan kepedulian masyarakat akan nasib pendidikan. Pada sisi lainnya tampak bahwa perlombaan berdirinya lembaga pendidikan Islam menguatkan kesan adanya kontestasi diantara Ormas tersebut dalam mengambil hati umat. Berbagai atribut dilekatkan, sekaligus keunggulan-keunggulan yang dijanjikan tidak luput dijadikan propaganda untuk menarik simpati masyarakat agar memasukkan anak-anak atau orang-orang terdekatnya ke lembaga pendidikan dimaksud.

Sekolah dengan label Islam Terpadu (IT) dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini hingga tingkat lanjutan, mungkin tidak disadari, telah membuat satu identitas yang menjadi pembeda di tengah masyarakat. Perspektif Hiper-realitas membacanya sebagai transformasi mengikuti trend pendidikan kekinian. Dengan menyematkan Islam Terpadu memberikan kesan menciptakan suatu realita baru di atas realitas. Meskipun di dalam praktiknya juga tidak jauh berbeda dengan sekolah non label Islam Terpadu. Meskipun pemakaian istilah Islam Terpadu mengesankan pendidikan yang dijalankan selama ini belum mencakup keterpaduan (integrasi). Islam tidak pernah memisahkan antara agama dan non agama. Islam adalah agama yang sempurna. Belum lagi dalam prakteknya, pendidikan dengan model ini akan mengerucut pada identitas yang eksklusivistik. Pendidikan dengan model Islam Terpadu sering mempraktekan *full day school*. Pendidikan model ini berpotensi menciptakan robot-robot yang jauh dari nilai realitas kemanusiaan. Karena otak siswa dijenuhkan dan dipaksakan dengan sistem pendidikan yang memenjarakan itu.

Oleh karena itu, pendidikan yang menyematkan label tertentu justeru sangat massif dalam lini masa periklanan. Menyematkan kemandirian, hafalan Al-Qur'an, dan cirikhas lainnya justeru menyebabkan eksklusivisme. Fenomena ini justeru menandakan bahwa kemerdekaan belajar yang harusnya menjadi ruh proses belajar tidak dapat dijalankan. Otoritas lembaga keagamaanlah yang menjadikan lembaga pendidikan menjadi tidak dapat lagi "memerdekakan diri" dalam menjalankan proses belajar.

2.4 Ideologisasi Lembaga Pendidikan Islam

Hadirnya Sekolah Islam Terpadu (SIT) di tengah masyarakat sepertinya telah memberikan satu pilihan bagi masyarakat. SIT dapat dikatakan sebagai simbolisasi atas perubahan paradigma masyarakat menengah ke atas terhadap pendidikan. Dengan cakupan biaya yang relatif mahal, SIT telah membuat "garis demarkasi" di dunia pendidikan. Hanya mereka yang berkecukupan saja yang dapat meyekolahkan anak-anaknya di sekolah mahal ini. Dengan penawaran sistem pembelajaran, gedung mewah, dan fasilitas yang memadai seakan menjelaskan bahwa pendidikan yang berkualitas itu harus mahal (Sumanti et.al, 2020). Dengan demikian, makin memperjelas siapa yang "boleh" bersekolah di sekolah berkualitas dan siapa yang berhak di sekolah yang "tidak berkualitas". Pada akhirnya, hanya kelompok tertentu saja yang mengisi ruang-ruang kelas di kelas yang berkualitas. Meskipun tidak berlaku mutlak bahwa sekolah mahal pasti menghasilkan lulusan yang terbaik, tetapi sudah menjadi pandangan umum bahwa sekolah berkualitas dapat meluluskan anak-anak yang bermutu juga.

Secara aliran dan ideologi, pendidikan Islam dapat dikategorikan menjadi pendidikan ideologis dan non ideologis. Pendidikan yang ideologis tampaknya terjebak lebih dalam lagi simulasi simbolisme. Keterjebakan dari aspek yang remeh temeh, seperti penampilan, pakaian dan bahkan sampai soal pemikiran dan garis perjuangan. Soal jilbab sampai cadar, dari soal celana cingkrang (isbal) sampai sarungan. Dari pakaian Koko sampai Jubbah.

Dalam hal pemikiran misalnya juga sangat tampak simbolisme. Misalnya tuduhan bid'ah sampai soal kafir. Juga jargon kembali kepada quran dan hadis. Sunnah dan non Sunnah. Labelisasi halal non halal. Persoalan poligami dan monogamy. Hal-hal inilah yang menjadi variable-variable menciptakan realitas baru dalam pendidikan Islam. Islam itu ya Timur Tengah, misalnya. Jika tidak alumni Timur Tengah, pemikirannya pasti dipengaruhi liberalism. Sedangkan antara Islam dan Liberalisme adalah dua hal yang tidak mungkin disatukan.

Pengajian-pengajian di komunitas majelis taklim adalah contoh yang paling orisinil. Saluran-saluran siaran pendidikan informal melalui saluran Media Sosial, Youtube, bahkan melalui radio dan televisi itu sangat jelas bagaimana komunitas ideologis itu telah menciptakan warna tersendiri. Jadi, sangat jelas pendidikan Islam telah benar-benar berada di era

simulkrum, dimana realitas itu sendiri diciptakan untuk membangun persepsi. Semua energy dan strategi diarahkan bukan kepada substansinya, tetapi yang terpenting adalah persepsinya walaupun itu dilakukan dengan tanpa sadar.

Merdeka Belajar dengan sendirinya dapat menangkal ideologisasi lembaga pendidikan Islam. Dengan standarisasi ujian, assessment, memberikan kebebasan kepada para guru untuk menyusun, mengaplikasikan dan mengembangkan RPS cukup memberikan ruang sehingga Ideologisasi lembaga pendidikan dapat mencair. Dengan standar baku pendidikan lembaga-lembaga pendidikan dengan sendirinya wajib mengikuti keputusan negara.

3. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Merdeka belajar adalah kebijakan yang cukup relevan dan dianggap sebagai solusi saat ini yang tepat dijalankan. Empat pokok pelaksanaannya adalah terkait ujian sekolah berstandar nasional, Assesmen, RPP, dan penerimaan peserta didik baru.
2. Dalam perspektif Hiper-realitas, pendidikan Islam sebagai sebuah realitas belum sepenuhnya dapat secara otonom membuat distingsi sendiri terhadap konsep Merdeka Belajar. Padahal secara konseptual, lembaga pendidikan Islam juga tidak kalah hebatnya dengan lembaga pendidikan lainnya. Pesantren sebagai lembaga tertua di Indonesia sesungguhnya telah terlebih dahulu menjalankan konsep merdeka belajar. Dalam pandangan hiper-realitas, ada tiga model keterjebakan pendidikan Islam ini, yaitu: pertama, dari aspek struktur, penggunaan istilah, dan yang berbau ideologis

Referensi

- Adawiya, R. (2017). Pendidikan Yang Berdaya Saing. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA*.
- Ali, H.G. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Quantum Teaching.
- Azwar, M. (2014). Teori Simulakra Jean Baudrillard dan Upaya Pustakawan Mengidentifikasi Informasi Realistis. *Khizanah al-Hikmah*, 2(1)
- Baudrillard, J. (1983). *Simulation*. New York
- Daga, A. T. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/educatio/article/view/1279/880>
- Darise, G. N. Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks “Merdeka Belajar”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan [FTIK] IAIN Manado*, 2(2).
- <http://www.publicapos.com/read/11608/Full-Day-School-Sistem-Pendidikan-Yang-Memenjarakan?>
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar>
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , *Teori Sosial Posmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.
- Suyanto, B. & M. Khusna A. (2010). *Anatomi Dan Perkembangan Teori Sosial*. Malang dan Yogyakarta: Aditya Media.
- Sumanti, S. T. (2020). Pengaruh Otoritas Keagamaan Di Sekolah Islam Terpadu. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 19(1), 1-11.